



Para Anggota Parlemen Prihatin dengan Rancangan Konstitusi Thailand dan Referendum yang Direncanakan

JAKARTA, 25 April 2016 – Anggota Parlemen Asia Tenggara untuk HAM (APHR) menyatakan keprihatinan mendalam tentang rancangan konstitusi baru Thailand serta rencana referendum terhadap piagam tersebut karena jelas diarahkan pemerintah militer untuk memperkuat dan memperpanjang kontrol atas politik Thailand dan menghilangkan peluang untuk debat terbuka.

Parlemen Asia Tenggara untuk Hak Asasi Manusia (APHR) mengkritik rencana junta untuk melarang kampanye atau menentang piagam sebelum referendum yang mana dijadwalkan untuk tanggal 7 Agustus dan meminta para pemimpin Thailand untuk membuka ruang diskusi publik yang luas terhadap rancangan referendum tersebut.

"Masyarakat Thailand diminta untuk memilih UU Pokok yang akan menentukan bagaimana mereka diatur sementara mereka bahkan tidak diizinkan untuk berbicara mengenai (rancangan referendum tersebut) secara terbuka karena ada ancaman penjara. Bagaimana mereka bisa diharapkan untuk membuat keputusan di bawah pengaturan ini? ", ujar Ketua APHR yang juga anggota Parlemen Malaysia, Charles Santiago.

"Jika junta benar-benar menganggap bahwa konstitusi adalah masalah pokok bagi masyarakat Thailand dan mereka diminta membuat keputusan, maka masyarakat harus diperbolehkan untuk berbicara langsung satu dengan yang lain tentang manfaat dan kelemahan rancangan tersebut. Tanpa memberikan ruang untuk terjadinya debat terbuka tersebut, junta Thailand secara langsung berusaha untuk memaksa konstitusi ini kepada masyarakat Thailand."

Hukum yang mengatur aturan dalam referendum yang telah disetujui oleh legislatif militer yang ditunjuk saat ini pada tanggal 7 April dgn memberikan kewenangan penghukuman hingga 10 tahun penjara bagi siapa saja yang menyebarkan informasi palsu untuk mempengaruhi pemilih atau mengganggu referendum. Pemimpin junta juga telah gagal untuk menjelaskan rencana mereka jika pemilih menolak konstitusi, dengan beberapa isyarat yang disampaikan bahwa penolakan untuk menyetujui rancangan saat ini bisa memperpanjang kekuasaan militer lebih lanjut.

"Orang tidak harus dijebloskan ke penjara untuk hanya mengekspresikan pendapat mereka. Kita telah melihat orang yang telah membuat komentar pada naskah tersebut mengalami penahanan sewenang-wenang dan disebut sebagai 'pendidikan ulang', serta aturan referendum tampaknya dirancang untuk memunculkan ketakutan di kalangan masyarakat

dan menghentikan perdebatan lebih lanjut," ucap Anggota Dewan APHR yang juga anggota Majelis Nasional Kamboja, Son Chhay.

"Nasib demokrasi di Thailand memiliki implikasi untuk seluruh wilayah (Asia Tenggara). Sangat penting bahwa para pemimpin dari seluruh Asia Tenggara berdiri bersama masyarakat Thailand dan berbicara dalam mendukung kebebasan berekspresi dan debat terbuka," kata Walden Bello, seorang anggota dewan APHR dan mantan anggota Kongres dari Filipina.

"Rancangan konstitusi ini harus diuji kemampuannya melalui debat terbuka dan diskusi. Mencoba untuk membungkam dan mengintimidasi para pengkritik bukanlah cara yang tepat untuk menjalankan negara dan tentu saja tidak tepat untuk mengatasi polarisasi politik dan perselisihan yang telah tertanam pada politik Thailand dalam beberapa tahun terakhir."

Rancangan konstitusi, yang dirilis secara publik pada 29 Maret, termasuk klausul yang mewajibkan Senat sepenuhnya diangkat dan memungkinkan penunjukan perdana menteri yang tidak terpilih. Piagam ini juga memberikan kontrol yang luas kepada militer atas urusan administrasi bahkan setelah pemerintah terpilih mulai bekerja. Selain itu, klausul dalam piagam tersebut memberikan kemungkinan legalisasi permanen perintah yang dikeluarkan secara sepihak oleh pemimpin NCP Prayuth Chan-ocha berdasarkan Pasal 44 dari rancangan konstitusi sementara yang disusun oleh junta.

Masyarakat sipil dan partai politik di Thailand telah mengkritik rancangan tersebut, khususnya menyoroti ketentuan tidak demokratis, termasuk tempat khusus disediakan untuk orang-orang ditunjuk militer. Kritik ini digemakan oleh para anggota parlemen di Asia Tenggara.

"Fakta bahwa konstitusi tersebut mempertahankan peran eksplisit untuk militer tanpa batas, amat memperhatikan," kata Anggota Dewan APHR yang juga anggota DPR dari Indonesia, Eva Kusuma Sundari.

"Kami telah melihat hasil dari persiapan yang sama di Myanmar, di mana militer menguasai 25 persen kursi dan mampu untuk memveto amandemen konstitusi. Ini hal yang utama dimana rakyat Myanmar dan pemerintah baru yang terpilih sekarang tengah berjuang untuk mengubahnya. Tampaknya aneh bila Thailand akan ingin mengadopsi dan mengadaptasi elemen model serupa yang banyak mendapat kritikan. Sementara hal tersebut inti gerakan reformasi di Indonesia, yaitu penegakkan supremasi sipil sebagai substansi demokrasi"

Para anggota parlemen Asia Tenggara juga menyoroti kurangnya perlindungan bagi hak-hak masyarakat dan lingkungan, yang tertulis dalam konstitusi Thailand sebelumnya. Pernyataan yang amat jelas dimasukkan dalam rancangan ini dimana negara diberi kekuasaan untuk melindungi hak-hak tertentu seperti memberikan wewenang untuk melakukan penyisiran, dimana amat terbuka untuk penyalahgunaan oleh penguasa berwenang.

"Semua variabel yang terdapat dalam sistem demokrasi langsung, yang sebelumnya dipertahankan dalam draft awal, telah dieliminasi. Kontrol rakyat atas hak-hak dan urusan

mereka sendiri sangat dibatasi pula, dan ini menciptakan preseden berbahaya bagi Thailand untuk dapat mampu kembali ke demokrasi penuh," ujar Eva Sundari.

"Konstitusi ini tampaknya merupakan upaya oleh militer Thailand untuk menumbangkan proses demokrasi yang normal dan memperkuat cengkeramannya pada sistem politik," tambah Charles Santiago. "Ini adalah satu lagi tanda mengkhawatirkan bagi sebuah negara yang telah mengalami kemunduran secara dramatis pada komitmen hak asasi manusia di bawah pemerintahan militer yang tidak terpilih selama hampir dua tahun hingga sekarang."